

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (UU No.11, 2009)

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk mencakup kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor informal, maka disahkanlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER-24/EM/IV/2006 tentang Panduan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja resmi dan selain dari pada itu ditetapkan juga Peraturan Pemerintah (PP) No.44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Ardianingsih¹, Langelo, & Wicaksono, 2021, p. 145)

Jaminan kerja merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga Negara yang harus diwujudkan dengan pendiri bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Setiap program maupun kegiatan dalam upaya melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja yang dilaksanakan sesuai

dengan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja serta untuk mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional. Maka dari itu, dibuatlah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Ketenagakerjaan Nasional yang memberikan aturan dan kepastian hukum tentang perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Nausthion,Mulyana,Apandi, 2021)

Pekerja sektor informal yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut. Pekerja sektor informal dapat dikelompokkan sebagai berikut: pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contoh; pedagang keliling atau asongan, artis, ojek dan lain-lain. (BPJS Ketenagakerjaan, 2020)

Tidak adanya peraturan mengenai kedudukan pekerja informal merupakan sebuah kekosongan norma undang-undang untuk memberikan hak yang sama antara pekerja formal dengan pekerja informal agar tercapai amanat pada Pancasila ke lima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Implementasi dalam melaksanakan agenda penyelenggaraan jaminan sosial masih terkendala kondisi ekonomi pekerja informal. Banyak pekerja informal belum mendaftarkan diri pada program tersebut karena minimnya wawasan dan kesadaran publik mengenai pentingnya program jaminan sosial dari ketenagakerjaan. Kerentanan risiko sakit dan kecelakaan saat bekerja dari peserta sektor informal disebabkan pada umumnya mereka seringkali mengabaikan keselamatan kerja. Selain itu

perekonomian pekerja informal berada di ekonomi menengah ke bawah sehingga lebih memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. (Gusti Ngurah Brama Abimayu, n.d.)

Ibrahim, Zulkarnain mengatakan bahwa pekerja di sektor informal kerap mengalami dampak ekonomi yang cukup besar di saat situasi ekonomi tidak stabil seperti saat terjadi pandemi yang mengguncang perekonomian di banyak negara tak terkecuali negara Indonesia. Banyak pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami kebangkrutan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran iuran jaminan sosial. Terhadap kondisi Peserta Mandiri yang demikian, Pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial sebagai upaya pencegahan dalam menangani ancaman ketidakstabilan sosial dari pekerja luar hubungan kerja seperti para pengusaha UMKM yang bermodal minim. (Gusti Ngurah Brama Abimayu, n.d.)

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga diharapkan mapu menjelaskan atau memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh Purtanti D (2019) yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar. Dalam penelitian ini melihat bahwa pada BPJS Ketenagakerjaan Kacab Blitar merupakan kantor cabang di kota kecil tetapi jumlah peserta setiap bulannya bertambah mengikuti kota-kota besar meskipun belum semua pekerja di kota Blitar tercover semua dengan adanya

BPJS tersebut. Masalahnya strategi, factor yang memengaruhi peningkatan kepesertaan dan factor yang di prioritaskan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Blitar. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan dilakukan dengan cara Observasi Partisipatif (Pengamatan) In-depth Interview (Wawancara Mendalam) dan Dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah kepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar menggunakan marketing mix : product, price, place, promotion, people, process, physical evidence (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar adalah promosi (promotion) dan harga (price) (3) Faktor yang diprioritaskan dalam meningkatkan jumlah kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Blitar adalah harga (price).

Pada penelitian kedua oleh Ezah W (2019) yang berjudul Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru. Masalahnya di kota Pekanbaru masih minim tenaga kerja sektor informal yang mengikuti program perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian menggunakan metode menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini masih belum optimal karena masih terlihat cukup banyak dari sekian banyaknya tenaga kerja informal yang belum mengikuti peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat dalam penelitian adalah berupa 1) Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tenaga kerja informal terhadap jaminan sosial 2) perusahaan kecil dan mikro yang terbebani oleh iuran bulanan paar pekerja 3) Masyarakat umumnya dan

tenaga kerja informal khususnya masih terfokus pada BPJS Kesehatan 4) SDM BPJS Ketenagakerjaan dan pemasaran yang belum optimal sepenuhnya serta sosialisasi yang dilakukan masih belum sering dilakukan terhadap tenaga kerja sektor informal.

Pada permasalahannya di Blitar masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar mengungkapkan bahwa hingga kini sudah ada sekitar 35 ribu orang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar. Dari jumlah itu, sekitar 12 ribu peserta dari Kota Blitar, sedangkan sisanya dari wilayah Kabupaten Blitar. Selain itu di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Blitar jumlah kepesertaan dari sektor informal masih cukup sedikit, yaitu di bawah 5%. Untuk itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Blitar akan fokus memberikan edukasi tentang pentingnya jaminan sosial, sehingga kepesertaan bisa dioptimalkan. (Antarajatim, 2022)

Bedasarkan permasalahan yang ada dan survey pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap 10 orang pekerja sector informal di dapatkan 1 orang telah faham dan terdaftar sebagai peserta, 9 orang masih belum menjadi peserta dan belum mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Strategi Marketing Peningkatan Peserta Sektor Informal di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Strategi apa yang dilakukan untuk Meningkatkan Peserta Pekerja Sektor Informal Terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan Blitar ?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Strategi Marketing Peningkatan Peserta Pekerja Sektor Informal di BPJS Ketenagakerjaan Blitar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui strategi people di BPJS Ketenagakerjaan Blitar agar meningkatkan kepesertaan sektor informal
- b. Untuk mengetahui startegi produk/program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar yang dapat diikuti oleh pekerja sektor informal.
- c. Untuk mengetahui strategi proses dalam meningkatkan kepesertan sector informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar
- d. Untuk mengetahui strategi promotion yang di gunakan dalam menarik konsumen

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam memperkuat hasil-hasil studi yang berkaitan dengan peningkatan jumlah kepesetaan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mempraktikkan teori yang didapat secara langsung di lapangan dan melihat secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan.

b. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar

Dapat dijadikan sarana pertimbangan peningkatan peserta pekerja sektor informal dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan feedback/balasan terhadap sesuatu pelayanan yang didapatkan.

c. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengembangan wawasan serta pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan.